

**KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PESISIR
DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2016**

Oleh: Yogi Gusfar Merwanto

Email : yogigusfar13@gmail.com

Pembimbing: Khairul Anwar

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Sub-district Coordination in the development of coastal areas in Gaung Subdistrict, Indragiri Hilir Regency in 2016 is coordinating sub-district strategic plans into regional development planning and implementation programs related to issues and characteristics as well as potential coastal areas. Based on the Report on the Implementation of Regional Government (LPPD) of the Gaung Subdistrict of Indragiri Hilir Regency in 2016, in general the physical realization of the development budget has been going well, but has not touched the main objective of the environmentally sound development plan or has not been harmonized and the synergy between the Annual Work Program (RKT) 2016 with a Strategic Plan (Renstra) for coastal area development related to issues and the potential of the Gaung sub-district as a coastal area.

The formulation of the research problem is how the coordination of sub-district heads in the development of coastal areas in the District of Gaung, Indragiri Hilir Regency in 2016, and the factors that influence the coordination of sub-districts in the development of coastal areas in 2016.

The aim of the study was to determine the coordination of sub-district heads in the development of coastal areas in the District of Gaung, Indragiri Hilir Regency in 2016 and the factors that influenced the coordination of sub-districts in the development of coastal areas in 2016.

The research method used is descriptive qualitative method with data collection instruments including interviews, observation and documentation studies related to the research objectives.

The results of the study illustrate that the subdistrict head in coordinating the subordinate work units and sub-district level work units in planning and implementing development tends to be oriented towards improving general programs in realizing community welfare, but ignoring or not optimally directing and harmonizing insightful development environment related to the characteristics of coastal areas, such as the lack of preservation / prevention of natural damage, and the development or empowerment of fishermen or copra farmers in coastal areas in Gaung District in 2016.

Keywords: *Coordination, Development, Coastal Areas.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah tepat sasaran dalam strategi pertumbuhan dan pemerataan (*growth with equity*), dan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari para aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Kantor Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Gaung yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra Kantor Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mensinergikan perencanaan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018.

Visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 oleh aparat pemerintahan Kecamatan Gaung adalah 'GAUNG BERMARTABAT 2025' yaitu terwujudnya masyarakat Kecamatan Gaung yang (BER) Ilmu Pengetahuan dan menguasai teknologi, (M) Makmur dan Sejahtera, (A) Agamis serta (R) Rukun dan Damai, dengan mengandalkan sektor (T) Pertanian dan (B) Terbuka bagi Investasi dengan menjamin (A) Keamanan,

(T) Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2025 (Rencana Strategis Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018: 43).

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan pula berbagai Misi kecamatan Camat Gaung (Rencana Strategis Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018: 43-44), yakni:

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya di seluruh wilayah pedesaan.
2. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Suasana Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Sebagai ukuran tercapainya Visi Kecamatan Gaung tersebut, pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok melalui perencanaan strategik kecamatan yang salah satu perencanaan strategisnya berhubungan aspek ruang/wilayah pesisir sebagai pencapaian sasaran-sasaran pokok, khususnya dari aspek wilayah pesisir (perairan) berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018 sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur

- a. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur khususnya perhubungan darat untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh desa.
- b. Meningkatkan pembangunan pengairan untuk pengembangan potensi

pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

- c. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi, kelistrikan, penyediaan air baku dan air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan umum serta dunia usaha.
- d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terutama terhadap sumber-sumber yang diperlukan bagi pengembangan aktifitas sosial, ekonomi dan publik guna peningkatan kesejahteraan.

2. Penyelamatan Lingkungan Hidup

- a. Mencegah untuk tidak terjadi pengurusan sumber daya secara berlebihan dan mengendalikannya guna menghindari terjadinya percepatan proses perusakan lingkungan.
- b. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan lindung.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dunia usaha tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan guna mempertahankan keberlanjutan pembangunan dimasa datang.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 program pembangunan masyarakat wilayah pesisir masih minim. Dari total keseluruhan anggaran untuk tahun 2016 sebesar

Rp. 2.925.861.816 dengan rincian sebagai berikut;

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.862.711.816 (digunakan, seperti untuk gaji pokok PNS/Uang Representasi, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum/ khusus, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja/prestasi kerja).
2. Belanja langsung sebesar 1.063.150.000 dengan rincian urusan dan program sebagai berikut;
 - a) Peministrasi perkantoran (penyediaan surat menyurat, alat tulis kantor, pemeliharaan kendaraan operasional, koordinasi konsultasi keluar dan kedalam daerah, dan sebagainya yang berhubungan dengan peministrasi perkantoran) sebesar Rp 199.235.000,-
 - b) Program pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor sebesar Rp 398.050.000.
 - c) Program yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat sebesar Rp. 410.285.000. (Sumber: Kantor Camat Gaung/ LPPD Tahun)

Secara umum realisasi fisik anggaran berjalan dengan baik, namun belum menyentuh sasaran pokok pada pembangunan infrastruktur diwilayah pesisir, yaitu pembangunan infrastruktur khususnya perhubungan darat untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh desa, dan meningkatkan pembangunan pengairan untuk pengembangan potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan

perikanan (Rencana Kerja Tahunan/RKT 2016).

Selain itu, urusan dan program/kegiatan kantor camat Gaung pada tahun 2016 belum memprioritaskan/menyentuh program-program penyelamatan lingkungan hidup, seperti pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, pembinaan terhadap kelompok nelayan/petani, guna mencegah/melestarikan proses perusakan/pelestarian lingkungan dan program dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan khusus wilayah pesisir belum terintegrasi dan selaras dengan pembangunan masyarakat dan karakteristik wilayah pesisir, seperti peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya perhubungan darat (jembatan) untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh desa, dan meningkatkan pembangunan pengairan untuk pengembangan potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, program-program penyelamatan lingkungan hidup, penanaman magrov dan bakau, dan program pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, pembinaan terhadap kelompok nelayan/petani, guna mencegah/melestarikan proses perusakan/pelestarian lingkungan dan program pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan

masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 ?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Rahmat Tegila, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNSRAT dengan judul Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan, pembagian tugas oleh camat dilakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi.

Penelitian oleh Ifan Salpian, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dilakukan dalam bentuk koordinasi vertikal dan

horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan kepala desa, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun dan pada rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan dan pertemuan lainnya diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan. Koordinasi horizontal dilakukan camat dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilakukan dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Penelitian oleh Irfan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar dengan judul Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat hasil penelitian menunjukkan Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan gampong, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan-masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka camat mengutus aparatur pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur gampong untuk memantau pekerjaan

pembangunan yang sedang dilakukan.

2. Kerangka Teori

Konsep dasar dari penelitian ini tidak lain adalah koordinasi. Menurut Hasibuan (2009:85) berpendapat bahwa “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi memiliki manfaat dan tujuan menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Hasibuan (2009:86) koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :

- 1) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- 2) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- 4) Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Menurut Hasibuan (2009:86-87), tipe koordinasi dalam organisasi dibagi menjadi dua bagian besar :

1. Koordinasi vertikal.

Koordinasi vertikal (*vertikal coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.

Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal.

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dengan sebuah latar ilmiah (Patilima, 2011: 3).

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya yang mengkaji lebih mendalam mengenai penelitian koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis melalui teknik pengumpulan data, baik dari wawancara, observasi, maupun penulisan dokumen, kemudian

dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai dimungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai penelitian koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.

HASIL PENELITIAN

A. Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Daerah Pesisir Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.

Secara konseptual fokus penelitian “Koordinasi Camat dalam pembangunan wilayah pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016” sebagai pengkoordinasian rencana-rencana strategis kecamatan kedalam program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat pada tahun 2016 yang berkaitan dengan isu-isu dan karakteristik maupun potensi wilayah pesisir, seperti pembangunan akses/infrastruktur (jembatan) yang menghubungkan antar desa atau sungai/parit, masalah lingkungan hidup, dan lainnya yang dikoordinasikan oleh camat dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan ataupun oleh masyarakat, untuk menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi program-program pembangunan di kecamatan.

1. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah, misalnya, antar Kepala Unit suatu Instansi

kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka, serta aparatur pemerintahan desa/kelurahan (Inu Kencana, 2011:36).

Koordinasi dapat dilakukan dengan empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah:

- 1) Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- 2) Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- 3) Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- 4) Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Dari hasil penelitian Camat telah mengkoordinasikan kepada jajaran Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan untuk memberitahukan

persiapan Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Cara koordinasi yang dilakukan Camat tersebut, yaitu dengan menunjuk seseorang atau suatu tim/panitia sebagai koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi terkait akan diadakannya kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan diselenggarakan pada awal bulan setiap tahunnya untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari masyarakat ditingkat desa/ kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) daerah tingkat kabupaten/ kota. Forum musyawarah ini tentunya sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, melalui forum musyawarah tersebut masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka

Dari hasil penelitian bahwa koordinasi Camat Gaung dalam kegiatan perencanaan pembangunan dilakukan melalui:

- a. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan (Musrenbang), dalam pertemuan tersebut dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring

- dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Dibentuknya tim Musrenbang yang terdiri dari unsur pimpinan instansi pemerintahan lokal (Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan lainnya) yang bertujuan merangsang/mendorong efektifitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - c. Diadakannya Musrenbang yang melibatkan aparatur pemerintahan desa dan aparatur kecamatan sendiri dalam menyampaikan atau mensosialisasikan informasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat, sehingga memberi kesempatan masyarakat untuk menerima informasi dan memberi keputusan (masukan) dalam proses perencanaan pembangunan (berdaya).

Dari perencanaan strategik Kecamatan Gaung dalam jangka menengah 5 tahun kedepan 2013-2018 ada dua program yang berkaitan erat dengan pembangunan berwawasan lingkungan dengan karakteristik daerah pesisir dengan urusan/program pilihan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir tersebut, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur melalui meningkatkan

pembangunan Infrastruktur khususnya perhubungan darat untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh desa (jembatan antar parit/sungai), dan meningkatkan pembangunan pengairan untuk pengembangan potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

2. Penyelamatan Lingkungan Hidup, melalui;
 - a. Mencegah untuk tidak terjadi pengurasan sumber daya secara berlebihan dan mengendalikannya guna menghindari terjadinya percepatan proses perusakan lingkungan.
 - b. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan lindung.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dunia usaha tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan guna mempertahankan keberlanjutan pembangunan dimasa datang.

Tabel 1
Program/ Kegiatan Berdasarkan Urusan Pilihan Kantor Camat Gaung
Tahun 2016

1	Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah d. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

3	Urusan Kebudayaan a. Program Pemngembangan Nilai Budaya - Pemberian Dukungan, Penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
4	Urusan Kepemudaan dan olah raga a. Program peningkatan peran serta kepemudaan - Pembinaan Organisasi Kepemudaan b. Program Peningkatan Peran dan Pemasarakatan Olah Raga - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
5	Urusan pemberdayaan masyarakat desa a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. - Pemberian Stimulasi Pembangunan Kelurahan

Sumber; Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gaung Tahun 2016

Dari hasil penelitian dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan cara menghadiri acara-acara (kegiatan) desa, dan melalui dokumen laporan desa. Sedangkan pada saat proses kegiatan pelaksanaan pembangunan berjalan koordinasi Camat dapat dikatakan belum berjalan optimal, hal tersebut dapat dianalisa dari pembinaan yang rendah dilakukan oleh Camat sebagai koordinator wilayah yang dipimpnnya kepada instansi desa, dimana berdasarkan observasi masih ditemukan seperti kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lainnya yang tidak memiliki kegiatan atau kantor/sekretariat tersebut hanya bersifat formalitas.

2. Koordinasi Horizontal

Untuk melaksanakan Koordinasi horizontal tersebut, maka perlu adanya kesamaan visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 oleh aparatur pemerintahan yaitu terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban pada tahun 2025, termasuk di dalamnya upaya-upaya mencegah penebangan hutan, kejahatan di

wilayah perairan, serta upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan, keamanan, ketertiban yang harus dikoordinasikan dengan instansi pimpinan ditingkat kecamatan Misalnya, antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil) yang memiliki fungsi yang sama pada suatu bidang, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan masalah, potensi dan karakteristik wilayah.

Tidak adanya kerjasama tertulis (kesepakatan kerjasama) tersebut mengakibatkan unit kerja dibawah camat atau unit kerja dibawah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Kecamatan Gaung tidak dapat melakukan koordinasi karena tidak adanya tugas lain yang dilimpahkan oleh Camat kepada jajarannya ataupun sebaliknya. Koordinasi antara unit kerja dibawah camat dengan unit kerja lembaga/ instansi lainnya hanya dapat melaksanakan kerjasama yang teratur ataupun koordinasi dalam konteks tugas resmi hanya dapat dilaksanakan dengan izin pimpinan.

Dari hasil penelitian terhadap fungsi koordinasi camat, baik

koordinasi yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal, dimana pembangunan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sistem perencanaan pembangunan *bottom up* (perencanaan yang awalnya dilakukan ditingkat paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah), maka dapat disimpulkan berdasarkan dokumen dan wawancara di atas koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan hanya berorientasi kepada peningkatan program-program umum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mengabaikan atau belum optimal dalam mengarahkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir, seperti pelestarian/pencegahan kerusakan alam, dan pemberdayaan nelayan atau petani kopra pada wilayah pesisir di Kecamatan Gaung pada tahun 2016.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Daerah Pesisir Di Kecamatan Gaung Tahun 2016

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di kecamatan Gaung tahun 2016, ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintahan)

Untuk itu, dalam menjalankan fungsi koordinasi camat dituntut

memiliki kemampuan dalam mengarahkan kepada para pegawainya yang disesuaikan dengan karakter para pegawainya itu sendiri dan terkhusus masyarakatnya sehingga mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam mendukung program-program pembangunan.

Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang direncanakan Camat Gaung untuk pembangunan wilayah, antara lain:

- a. Meningkatkan, mengembangkan dan menerapkan sistem-sistem yang efektif yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia pada berbagai bidang dan sektor terkait secara komprehensif.
- b. Meningkatkan akses masyarakat dan memperluas jangkauan institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar, lanjutan dan perguruan tinggi. Serta pada institusi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memiliki daya tampung yang memadai kepada masyarakat.
- c. Mencegah berkembangnya berbagai penyakit masyarakat yang akan mengakibatkan rusaknya moral, mental dan tatanan nilai yang ada di masyarakat.

Kemampuan camat dalam mengkoordinasikan program pembangunan dengan instansi juga perlu dilakukan. Salah satu bentuk koordinasi dengan unit kerja lainnya adalah komunikasi dengan pemerintahan desa, dimana program-program pembangunan yang langsung dilimpahkan ke pemerintahan desa (Program Desa Harapan, Desa Maju Inhil Jaya/DIMJ) yang menimbulkan

dampak eksternalitas bagi kecamatan (Koordinasi dengan pemerintahan kecamatan) serta program-program pemberdayaan yang langsung difasilitasi/pembinaan oleh pemerintahan kecamatan untuk desa-desa perlu dukungan pemerintahan desa.

Kemampuan dalam menjalin koordinasi dengan unit-unit kerja tersebut dibutuhkan agar program/kegiatan yang ada di kecamatan tidak kalah pentingnya dalam menunjang kegiatan pembangunan khususnya dalam hal melakukan pengarahannya kepada masyarakat, merencanakan kegiatan pembangunan melalui Musrenbang tingkat kecamatan dan program-program lain yang berkenaan langsung dengan masyarakat.

2. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan adalah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian koordinasi Camat, baik itu sumber daya aparatur pemerintah desa maupun aparatur pemerintah kecamatan dan juga sumber daya

pendukung lainnya dalam mendukung Koordinasi Camat dalam pembagian kerja. Di Kantor Camat Gaung di ketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Camat Gaung memiliki 19 orang, dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan berbedanya tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai kantor Camat Gaung tersebut maka berbeda pula kemampuan, serta mempengaruhi adanya kepercayaan amanah yang dipercayakan untuk memangku suatu jabatan.

Gambaran kompetensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Camat Gaung atau kualitas SDM Kantor Camat Gaung dilihat dari tingkat pendidikannya formal pada tabel di bawah 3.3 berikut. Untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Camat Gaung pada tahun 2016 berjumlah 24 orang (19 laki-laki dan 5 perempuan) dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2
Jumlah PNS Yang Bertugas di Kantor Camat Gaung Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Tingkat Pendidikan					Jumlah
SD	SLTP	SMA	Diploma	Sarjana	
-	1	14	1	8	24

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPS/ Kecamatan Gaung Dalam Angka 2017).

Dari hasil penelitian kondisi georgafis Kecamatan Gaung yang merupakan wilayah pesisir (wilyah perairan dengan kondisi pasang surut), berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 38 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Gaung secara kuantitas masih membutuhkan pegawai untuk mengisi jabatan dan membantu Camat dalam tugasnya.

Sedangkan secara kualitas, khususnya aparatur kantor Camat Gaung masih belum maksimal karena menghadapi berbagai

permasalahan, antara lain Belum tersedianya SDM aparatur Kecamatan Gaung yang memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong.

Masih kurangnya pegawai dan pegawai yang memiliki kompetensi menyebabkan pembangunan di wilayah kecamatan lebih terfokus pada penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada kantor camat Gaung, sehingga permasalahan-permasalah lingkungan kerang diperhatikan oleh unit kerja yang ada pada kantor Camat Gaung.

3. Kesatuan Tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Hubungan kerja antara Camat dan pegawainya menyebabkan secara otomatis terjadi pemberian motivasi secara langsung dari pemimpin terhadap pegawainya dengan tujuan bekerja demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini program pembangunan yang direncanakan Kantor Camat Gaung terlaksana dengan baik dengan hubungan yang baik pula dengan pegawai Kantor Camat Gaung.

Namun dalam hal memotivasi masyarakat atau lembaga-lembaga di bawah kecamatan guna menyatukan tindakan pembangunan yang selaras

yang berada di desa setempat dalam wilayah Kecamatan Gaung belum berjalan secara signifikan, biasanya dalam bentuk pertemuan formal seperti diskusi, penyuluhan, diskusi dan lainnya.

Koordinasi yang dilakukan camat belum menimbulkan kesatuan tindakan atau kesadaran unit-unit kerja terutama di tingkat desa dalam mendukung program-program pembangunan daerah pesisir. Arahan kerja hanya terfokus pada kegiatan Musrenbang, sedangkan dalam bentuk diskusi, ataupun diadakan pertemuan formal secara kuantitas belum berjalan memadai. Koordinasi Camat dalam dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan di wilayah kecamatan akan dapat berjalan dengan optimal apabila didukung oleh kesadaran dan kesatuan tindakan dari unit kerja ditingkat desa maupun kecamatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Koordinasi Camat dalam Pembangunan Daerah Pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi camat dalam pembangunan daerah pesisir di Kecamatan Gaung belum berjalan optimal, dimana;
 - a. Koordinasi vertikal yang dijalankan Camat Gaung, baik secara langsung maupun melalui unit kerja di kecamatan kepada unit-unit kerja dibawahnya di wilayah Kecamatan Gaung dalam pembangunan daerah pesisir, yang dimulai dengan perencanaan pembangunan

dari tingkat desa sampai kecamatan melalui forum Musrenbang dan menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 atau perencanaan pembangunan *bottom up* (perencanaan yang awalnya dilakukan ditingkat paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah), maka koordinasi Camat dalam pelaksanaan pembangunan hanya berorientasi kepada peningkatan program-program umum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan belum terarah serta sinergi dengan perencanaan strategik yang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok terkait isu-isu wilayah pesisir, seperti pelestarian/pencegahan kerusakan alam, dan pemberdayaan nelayan atau petani kopra pada wilayah pesisir di Kecamatan Gaung pada tahun 2016. Selain itu, koordinasi dalam proses pelaksanaan pembangunan belum berjalan optimal, dimana belum teraturnya unit kerja ditingkat desa dalam mendukung pembangunan, seperti kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lainnya yang tidak memiliki kegiatan atau kantor/ sekretariat tersebut hanya bersifat formalitas).

- b. Koordinasi horizontal belum berjalan optimal, dimana tidak adanya kerjasama

tertulis (MoU) dalam mendukung proses pembangunan di Kecamatan Gaung. Forum Muspika hanya berbentuk bertukar ide/masukan dengan tindak lanjut tugas dan fungsi dikembalikan pada masing-masing instansi sesuai undang-undang, tanpa menghasilkan keputusan bersama yang mengikat (MoU). Konsekuensinya, koordinasi antara unit kerja dibawah Camat atau sebaliknya dalam konteks tugas resmi hanya dapat dilaksanakan dengan izin pimpinan (tidak adanya MoU/Kesepakatan antara instansi Camat, Kapolsek, Danranmil atau lainnya yang sederajat).

B. Saran

Koordinasi Camat dalam Pembangunan Daerah Pesisir di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir perlu mendapatkan perhatian dengan kondisi geografis wilayah pesisir (kepulauan) sehingga kedepannya sesuai harapan, maka berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran atau masukan antara lain:

1. Camat hendaknya membentuk pertemuan resmi atau terjadwal antara unsur-unsur atau unit kerja dibawah Camat, misal dengan aparatur desa dalam wilayah Kecamatan Gaung.
2. Adanya arahan dari pimpinan (Camat) kepada aparatur pemerintahan kecamatan dalam membantu mengkoordinasikan program-program perencanaan strategis pembangunan, seperti memberi penjelasan/informasi terkait rencana strategis yang

telah ditetapkan pada program pembangunan daerah pesisir kepada aparatur pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Gaung guna mendukung rencana kerja tahunan yang dilaksanakan sesuai potensi karakteristik pembangunan daerah pesisir.

3. Adanya pemanfaatan/peningkatan sarana teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kesatuan tindakan aparatur Kantor Camat Gaung atau unit kerja (pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, seperti website) guna menyesuaikan kesatuan tindakan yang dijalankan aparatur pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Gaung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Mengali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Menejemen* (Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan Belas). BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Edisi Revisi Cetakan Ketiga Belas). Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta.
- Inu, Kencana Syafii. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Manullang. 2008. *Manajemen Personalia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ndraha. Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Cetakan Kedua. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nogroho Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. PT Media Kamputindo.
- Patilima Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Supriadi, Dedy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surjono, MTP. 2010. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*. PWK UB Universitas Brawijaya. Malang.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yohanes, Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Bupati Indragiri Hiir Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018.
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Gaung Tahun 2016.
- Sumber Lainnya :**
- Ifan Saalbilan (Jurnal). 2018. *Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Irfan (Skripsi). 2015. *Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar.
- Rahmat Tegila (Jurnal). 2016. *Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNSRAT.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Gaung Dalam Angka Tahun 2017).
- Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah, LAN RI – DSE Jerman, Jakarta 1999.
- <http://wikipedia>. daftar pulau di Indonesia.